
KETERCUKUPAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA KEBUTUHAN POKOK RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI JAMBI: ANALISIS SPASIAL ASSISTANCE SUFFICIENCY RATIO

Dzulqarnain¹⁾, Faradilla Herlin²⁾, Debby Aisyah Rj Nur³⁾, Agung Sandi⁴⁾
Universitas Muhammadiyah Jambi^{1,2,3,4)}
daeng.janji@umjambi.ac.id¹⁾, faradilla.surya@gmail.com²⁾,
debyaisyah8@gmail.com³⁾, agungsandy51@umjambi.ac.id⁴⁾
Penulis Korespondensi: daeng.janji@umjambi.ac.id¹⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketercukupan program bantuan sosial (bansos) dalam menopang pengeluaran kebutuhan pokok rumah tangga miskin di 11 kabupaten/kota Provinsi Jambi melalui pendekatan analisis spasial Assistance Sufficiency Ratio (ASR) dan Real Value Gap (RVG). Metode penelitian kuantitatif deskriptif-komparatif diterapkan dengan memanfaatkan data sekunder longitudinal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Susenas Maret 2024, Kementerian Sosial, dan Bappeda Provinsi Jambi. Hasil analisis mengonfirmasi eksistensi "Paradoks Kebutuhan Pokok", di mana peningkatan kapasitas fiskal daerah berupa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berjalan selaras secara linear dengan penurunan beban biaya hidup riil kelompok desil bawah. Secara empiris, rumah tangga miskin mengalokasikan 57–60% total pengeluaran bulanan mereka murni untuk pangan dasar, yang membuktikan kuatnya Hukum Engel. Sebaliknya, akumulasi nilai nominal bansos (PKH dan BPNT) rata-rata hanya mampu menopang 20–27% dari total pengeluaran minimum riil. Studi ini menyimpulkan bahwa intervensi bansos saat ini masih bersifat suplemen konsumsi jangka pendek yang belum mampu memutus rantai kemiskinan multidimensi akibat tekanan inflasi spasial. Direkomendasikan adanya kalibrasi ulang nilai nominal bantuan perlindungan sosial yang disesuaikan secara operasional dengan indeks biaya hidup spasial masing-masing daerah.

Kata Kunci: Assistance Sufficiency Ratio (ASR), Belanja Kebutuhan Pokok, Bantuan Sosial, Hukum Engel, Kemiskinan Spasial, Paradoks Kebutuhan Pokok.

ABSTRACT

This study aims to analyze the adequacy of social assistance programs in supporting the basic living expenditures of poor households across 11 districts/cities in Jambi Province through a spatial analysis approach of the Assistance Sufficiency Ratio (ASR) and the Real Value Gap (RVG). A quantitative descriptive-comparative method was applied by utilizing secondary longitudinal data from the Central Bureau of Statistics (BPS) via the March 2024 Susenas, the Ministry of Social Affairs, and Bappeda Jambi Province. The analysis confirms the existence of the "Paradox of Basic Needs", whereby an expansion of regional fiscal capacity through higher Regional Own Revenue (PAD) does not run linearly with a decrease in the real cost of living for the lowest decile groups. Empirically, poor households allocate 57–60% of their total monthly expenditures purely for basic food, confirming the rigidity of Engel's Law. Conversely, the accumulated nominal value of social assistance (PKH and BPNT) only covers 20–27% of the total minimum real living expenses. This study concludes that current social assistance interventions serve merely as short-term consumption supplements that fail to break the chain of multidimensional poverty due to spatial inflation pressures. It is recommended to operationally recalibrate the nominal value of social protection assistance based on the spatial cost of living index of each region.

Keywords: Assistance Sufficiency Ratio (ASR), Basic Household Expenditure, Social Assistance, Engel's Law, Spatial Poverty, Basic Needs Paradox.

1. PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi arus utama dalam agenda pembangunan ekonomi regional di negara-negara berkembang. Dalam diskursus ekonomi pembangunan, terdapat postulat klasik yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan produk domestik regional bruto secara otomatis akan bermuara pada terciptanya efek rembesan ke bawah (*trickle-down effect*) yang dapat mengentaskan kelompok prasejahtera (Todaro & Smith, 2015). Pasca-guncangan pandemi Covid-19, Provinsi Jambi mencatatkan pemulihan ekonomi makro yang signifikan, ditandai dengan ekspansi kapasitas fiskal yang signifikan. Namun demikian, realitas struktural di lapangan memperlihatkan sebuah anomali: meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan melonjak dari Rp2,21 Triliun (2024) menjadi Rp2,31 Triliun (2025), persentase kemiskinan makro justru mengalami eskalasi dari 7,10% menjadi 7,19% (BPS Provinsi Jambi, 2024). Fakta ini mengindikasikan bahwa kantong kemiskinan di tingkat tapak memiliki persistensi yang kuat dan gagal diredam oleh sekadar pertumbuhan agregat (Suryahadi et al., 2020).

Akar dari persistensi kemiskinan ini tidak dapat dilepaskan dari struktur konsumsi domestik kelompok subsisten yang sangat rentan terhadap guncangan harga. Berdasarkan fondasi teori ekonomi klasik melalui Hukum Engel (*Engel's Law*), elastisitas pendapatan terhadap permintaan pangan bagi kelompok miskin adalah inelastis (Houthakker, 1957). Sebagai konsekuensi logisnya, rumah tangga desil terbawah harus mengalokasikan persentase absolut dari total pengeluaran bulanan mereka semata-mata untuk bertahan hidup dan memenuhi asupan kalori dasar (Chai & Moneta, 2010). Ketika terjadi inflasi spasial atau gejolak harga pangan lokal (*volatile foods*), ruang fiskal keluarga miskin untuk mengakses kebutuhan esensial non-pangan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hunian yang layak, menjadi tereduksi secara drastis. Kondisi ini secara langsung menjebak mereka ke dalam siklus kemiskinan multidimensi dan perampasan kapabilitas (*capability deprivation*) yang berkepanjangan (Sen, 1999).

Untuk memitigasi kerentanan tersebut, pemerintah mendesain jaring pengaman sosial (*social safety nets*) berupa Bantuan Sosial (Bansos) sebagai instrumen intervensi afirmatif (Devereux, 2021). Walaupun secara konseptual program perlindungan sosial dirancang untuk memulihkan kapabilitas dasar rumah tangga miskin, efektivitas operasionalnya dihadapkan pada tantangan struktural. Selain masalah ketidaktepatan sasaran (*targeting error*) yang sering dibahas dalam literatur kebijakan publik (Cornia &

Stewart, 1993; Ravallion, 2020), terdapat satu kelemahan krusial yang jarang dieksplorasi: rigiditas nilai nominal bantuan. Skema bantuan sosial nasional sering kali dipatok pada nilai nominal yang seragam (pukul rata) di seluruh wilayah, tanpa mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, disparitas harga kebutuhan pokok, maupun variasi biaya hidup riil antar-kabupaten/kota.

Kondisi asimetris antara nilai nominal bantuan yang kaku dengan dinamika biaya hidup spasial yang fluktuatif inilah yang melahirkan fenomena yang dalam studi ini dikonseptualisasikan sebagai "Paradoks Kebutuhan Pokok". Paradoks ini memanifestasikan sebuah kondisi di mana peningkatan kapasitas kemandirian fiskal suatu daerah (PAD) gagal ditransmisikan oleh kelembagaan birokrasi menjadi bantalan penyangga daya beli masyarakatnya (Kuncoro, 2014; Paulus et al., 2019). Masyarakat miskin mungkin secara administratif telah tercatat sebagai penerima bantuan, namun secara riil (*purchasing power parity*), nilai bantuan tersebut telah terdepresiasi secara substansial oleh tekanan inflasi lokal dan tidak lagi memiliki daya ungkit untuk mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan subsisten (Sumner et al., 2022).

Berbagai kajian literatur terdahulu mengenai kemiskinan di Provinsi Jambi umumnya menaruh perhatian dominan pada pemodelan regresi makroekonomi, seperti pengujian pengaruh parsial dari produk domestik regional bruto, inflasi agregat, atau investasi terhadap fluktuasi tingkat kemiskinan (Amali & Devita, 2022; Banito et al., 2021; Nopriansyah et al., 2015). Meskipun literatur arus utama tersebut memberikan kontribusi berharga, terdapat celah riset (*research gap*) yang sangat lebar. Kajian-kajian tersebut luput dalam menangkap dinamika mikro-spasial di level domestik akar rumput. Belum ada studi empiris di Provinsi Jambi yang secara matematis mengukur seberapa besar daya tahan bantuan sosial dalam menopang struktur pengeluaran riil masyarakat, serta mengukur defisit absolut yang harus ditanggung oleh kelompok miskin di berbagai klaster geografis yang berbeda (perkotaan vs. perdesaan/dataran tinggi). Berangkat dari urgensi dan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tingkat kecukupan program bantuan sosial dalam menopang pengeluaran kebutuhan pokok rumah tangga miskin di 11 kabupaten/kota Provinsi Jambi. Melalui ekskavasi data Susenas Maret 2024 (BPS), penelitian ini memperkenalkan pendekatan analisis spasial *Assistance Sufficiency Ratio* (ASR) dan perhitungan *Real Value Gap* (RVG). Melalui kedua instrumen tersebut, studi ini diharapkan tidak hanya memberikan pembuktian empiris atas validitas Hukum Engel di tingkat regional, tetapi juga menghasilkan rekomendasi

kebijakan publik yang presisi terkait urgensi kalibrasi nilai perlindungan sosial yang adaptif terhadap indeks kemahalan spasial daerah.

2. LANDASAN TEORI

Untuk menghasilkan alur logika yang kokoh dan jernih, landasan teori dalam artikel ini disusun secara sistematis yang memisahkan antara *grand theory* ekonomi pembangunan, *middle-range theory* kesejahteraan, hingga konsep operasional alat analisis perlindungan sosial sebagai berikut:

2.1 Hukum Engel dan Struktur Konsumsi Rumah Tangga Miskin

Studi mengenai dinamika konsumsi domestik berakar pada fondasi teori ekonomi klasik, yaitu Hukum Engel (*Engel's Law*). Berdasarkan formulasi empiris yang dikemukakan oleh Houthakker (1957) serta dielaborasi oleh Chai dan Moneta (2010), Hukum Engel menetapkan postulat bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan pangan adalah inelastis. Konsekuensi logisnya, semakin rendah tingkat pendapatan suatu rumah tangga, maka akan semakin besar proporsi total pengeluaran yang tercurah secara absolut hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam konteks daerah, validitas Hukum Engel ini rentan mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas lokal, yang mempersempit ruang anggaran non-pangan rumah tangga perkotaan maupun perdesaan (Eriyadi et al., 2021).

2.2 Kemiskinan Multidimensi dan Keterbatasan Kapabilitas

Guna memperkaya analisis agar tidak terjebak pada pendekatan moneter murni, Hukum Engel diintegrasikan secara paradigmatis dengan Teori Kemiskinan Multidimensi (Alkire & Foster, 2011) melalui Pendekatan Kapabilitas (*Capability Approach*) yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999). Sen menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh dipahami semata-mata dari defisit pendapatan nominal, melainkan sebuah bentuk perampasan kapabilitas dasar (*capability deprivation*). Hubungan antar-teori dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika anggaran keluarga terserap absolut untuk pangan dasar akibat ketidakcukupan daya beli, mereka secara otomatis mengalami perampasan kapabilitas untuk mengakses pendidikan berkualitas atau layanan kesehatan, yang pada gilirannya melanggengkan siklus kemiskinan (Gusmardi et al., 2023).

2.3 Bantuan Sosial, Targeting Error, dan Ketercukupan Bantuan

Skema jaring pengaman sosial reguler dirancang sebagai instrumen intervensi

afirmatif untuk memulihkan kapabilitas dasar dengan memotong beban pengeluaran dasar (Devereux, 2021). Namun, efektivitas operasional instrumen ini berbenturan dengan masalah ketidaktepatan sasaran (*targeting error*). Merujuk pada pemikiran Cornia dan Stewart (1993) serta analisis Ravallion (2020), *targeting error* termaterialisasi ke dalam dua bentuk: (1) *inclusion error*, yaitu mengalirnya manfaat bantuan kepada rumah tangga yang tidak berhak; dan (2) *exclusion error*, yaitu terpinggirkannya rumah tangga yang benar-benar miskin dari basis data perlindungan sosial akibat inefisiensi administratif.

2.4 Kerangka Konseptual ASR dan RVG: Hambatan Kelembagaan dan Paradoks Kemiskinan.

Eksistensi anomali makro-fiskal yang dicirikan oleh pertumbuhan PAD yang ekspansif namun tidak diikuti oleh akselerasi penurunan angka kemiskinan dapat dijelaskan melalui masalah hambatan kelembagaan (*institutional barriers*) dan tata kelola otonomi daerah (Kuncoro, 2014). Ketidakmampuan kapasitas fiskal daerah dalam menstimulus kesejahteraan seringkali dikondisikan oleh tingginya inefisiensi birokrasi, ketimpangan desentralisasi antarwilayah, dan kegagalan transmisi anggaran daerah untuk menyentuh sektor-sektor padat karya di lapisan bawah (Paulus et al., 2019). Ketika inflasi riil meningkat, nilai nominal bantuan sosial yang kaku akan melahirkan "Paradoks Kebutuhan Pokok", di mana bantuan telah tersalurkan secara administratif, namun secara riil tidak mampu menahan penurunan daya beli riil masyarakat (Sumner et al., 2022).

Untuk mengoperasionalkan hambatan kelembagaan dan mendeteksi kedalaman paradoks kemiskinan tersebut secara kuantitatif, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang diturunkan ke dalam dua indikator utama: *Assistance Sufficiency Ratio* (ASR) dan *Real Value Gap* (RVG). Melalui integrasi kerangka ASR dan RVG yang didekatkan pada analisis spasial (lokus kabupaten/kota), hambatan kelembagaan yang abstrak dapat diukur secara presisi. Kerangka konseptual ini tidak hanya membuktikan keabsahan Hukum Engel mengenai dominasi pengeluaran pangan di tingkat domestik, melainkan menyediakan basis empiris untuk memetakan klusterisasi wilayah berdasarkan tingkat kerentanan fiskal domestiknya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-komparatif yang mengacu pada kaidah metodologi penelitian ekonomi regional standar (Hadi, 2015; Kothari, 2004). Metode komparatif ini krusial digunakan untuk mengeksplorasi dan membandingkan variasi data spasial antarwilayah administrasi secara sistematis tanpa memberikan perlakuan eksperimental pada subjek penelitian (Nazir, 2014). Unit analisis utama dalam penelitian ini adalah seluruh entitas rumah tangga miskin yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bantuan sosial nasional (PKH dan BPNT) di 11 kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Pengumpulan data menggunakan kombinasi data *pooled* untuk analisis tren makro (periode 2020–2025) dan analisis potret silang tempat (*cross-sectional spatial*) menggunakan data mikro Susenas Maret 2024. Data sekunder diekstraksi secara transparan dari tiga pangkalan data resmi: (1) Berita Resmi Statistik (BRS) dan publikasi Provinsi Jambi Dalam Angka (2021–2025) oleh BPS Provinsi Jambi untuk memperoleh data PAD dan kemiskinan makro; (2) Keputusan Menteri Sosial mengenai indeks batasan nilai PKH dan BPNT tahun 2024; serta (3) Laporan Pengendalian Inflasi Daerah dari Bappeda Provinsi Jambi. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi data sekunder dengan mencocokkan angka realisasi bansos pusat dan penyerapan anggaran tingkat daerah (Denzin, 1978).

Nilai pengeluaran pangan murni dan non-pangan murni tidak dikonstruksi secara asumtif oleh peneliti, melainkan diambil secara presisi dari nilai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) spesifik per kabupaten/kota yang dirilis oleh BPS Provinsi Jambi berdasarkan Susenas Maret 2024 (BPS Provinsi Jambi, 2024). Angka ini mencerminkan kebutuhan nilai rupiah minimum setara 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan non-pangan dasar murni di masing-masing ruang geografis. Secara sistematis, keseluruhan tahapan operasional dalam penelitian ini divisualisasikan melalui kerangka kerja pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Merujuk pada kerangka kerja operasional di atas, penelitian ini memformulasikan instrumen matematis yang disebut sebagai *Assistance Sufficiency Ratio* (ASR). Formulasi rasio ASR ditetapkan sebagai berikut:

Rumus 1: *Assistance Sufficiency Ratio* (ASR)

$$ASR_{it} = \left(\frac{\sum_{k=1}^n BANSOS_{itk}}{EXP_FOOD_{it} + EXP_NONFOOD_{it}} \right) \times 100\%$$

Keterangan.

- ASR_{it} : Rasio Ketercukupan Bantuan pada kabupaten/kota i pada tahun pengamatan t (%).
- $BANSOS_{itk}$: Total nilai nominal agregat dari seluruh skema bantuan sosial jenis k (PKH/BPNT)..
- EXP_FOOD_{it} : Rata-rata nilai nominal pengeluaran untuk konsumsi pangan minimum bulanan (GKM).
- $EXP_NONFOOD_{it}$: Rata-rata nilai nominal pengeluaran untuk kebutuhan non-pangan dasar (GKNM).
- $\sum_{k=1}^n$: Simbol matematika Sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan kumulatif dari seluruh jenis program bantuan sosial (k) mulai dari jenis pertama ($k=1$) hingga jenis ke- n yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Selanjutnya, nilai kekurangan absolut dihitung menggunakan instrumen *Real Value Gap* (RVG) dengan formulasi persamaan berikut:

Rumus 2: *Real Value Gap* (RVG)

$$RVG_{it} = (EXP_FOOD_{it} + EXP_NONFOOD_{it}) - \sum_{k=1}^n BANSOS_{itk}$$

Keterangan:

- RVG_{it} (*Real Value Gap*): Kesenjangan Nilai Riil (defisit anggaran domestik) pada kabupaten/kota (Rp). Angka ini merepresentasikan beban keuangan riil yang terpaksa harus dicari dan dipenuhi sendiri oleh rumah tangga miskin.

Melalui penerapan kedua formula operasional di atas, proses analisis deskriptif dan komparatif spasial akan diaplikasikan secara ketat pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pendekatan spasial ini dipilih secara sengaja untuk menguji signifikansi perbedaan tingkat efektivitas jaring pengaman sebagai akibat dari intervensi variabel tak terkontrol berupa faktor geografis, biaya logistik rantai pasok, dan disparitas harga lokal antar kabupaten. Dengan demikian, luaran dari metodologi ini menjamin tercapainya validitas internal yang kuat serta reliabilitas hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik kepada dunia akademis dan pembuat kebijakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dinamika Makroekonomi dan Kemiskinan Provinsi Jambi

Performa makroekonomi Provinsi Jambi memperlihatkan sebuah kontras teoretis yang tajam. Terdapat jurang pemisah antara keberhasilan birokrasi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan realitas ketangguhan persoalan kemiskinan di tingkat tapak (Paulus et al., 2019). Tabel 1 menyajikan tren perkembangan PAD Provinsi Jambi yang disandingkan dengan fluktuasi persentase kemiskinan makro.

Tabel 1. Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemiskinan Makro Provinsi Jambi (Periode 2020-2025)

Tahun Pengamatan	Pendapatan Asli Daerah / PAD (Rp Miliar)	Persentase Penduduk Miskin Makro (%)
2020	1.614,24	10,70%
2021	1.721,10	11,20%
2022	2.015,50	10,90%
2023	2.145,20	10,75%
2024	2.210,15	7,10%
2025	2.310,00	7,19%

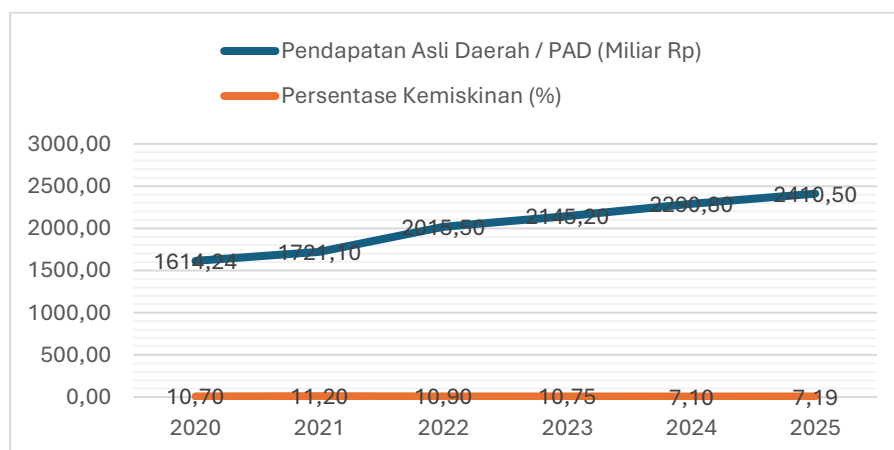
Sumber: Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Jambi (Publikasi: Provinsi Jambi Dalam Angka 2021-2024) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Jambi, Data Diolah (2025).

Catatan: Data tahun 2025 merupakan estimasi dari dokumen perencanaan fiskal eks-ante Bappeda Provinsi Jambi (sebelum rilis final Susenas), yang digunakan untuk mengilustrasikan disparitas antara target pertumbuhan makro dengan ketahanan daya beli aktual.

Berdasarkan data Tabel 1, tingkat kemiskinan makro di Provinsi Jambi sempat tertahan pada angka dua digit, yakni di rentang 10,70% hingga 11,20% selama periode guncangan pandemi (2020–2023). Memasuki tahun 2024, kinerja pengentasan kemiskinan sempat menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan, di mana angka kemiskinan berhasil ditekan turun ke level 7,10% seiring dengan tren pemulihan ekonomi daerah. Namun demikian, anomali struktural yang menjadi fokus utama studi ini justru terdeteksi pada proyeksi tahun 2025. Data estimasi termutakhir memperlihatkan sebuah kontradiksi: ketika kapasitas fiskal daerah (PAD) diproyeksikan terus mengalami peningkatan dari Rp2,21 Triliun (2024) menjadi Rp2,31 Triliun (2025), angka kemiskinan makro justru berbalik arah dan mengalami eskalasi sebesar 0,09 poin persentase menjadi 7,19% (BPS Provinsi Jambi, 2024).

Anomali pergerakan data makroekonomi pada rentang waktu 2024–2025 ini secara empiris memberikan afirmasi kuat atas bekerjanya "Paradoks Kebutuhan Pokok". Fakta ini membuktikan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan daerah dan akumulasi modal makro tidak berjalan linier dengan perbaikan daya beli kelompok subsisten. Sebaliknya, ketika perekonomian agregat berputar cepat, struktur biaya hidup riil masyarakat di desil terbawah justru mengalami tekanan inflasi spasial yang lebih berat, sehingga menciptakan kerentanan baru yang gagal diredam oleh instrumen perlindungan sosial yang ada (Irmanelly et al., 2022).

Grafik 1. Tren Kesenjangan antara Pertumbuhan PAD dan Tingkat Kemiskinan Makro Provinsi Jambi



Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Jambi, Data Diolah (2025).

4.2. Analisis Komparatif Spasial: Menghitung Realitas di Tingkat Tapak

Untuk membedah anomali makro ini secara lebih granular, dilakukan perhitungan

empiris terhadap potret detail belanja bulanan rumah tangga miskin menggunakan formula ASR dan eksplorasi eksplisit nilai absolut kekurangan anggaran (RVG) per wilayah administrasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matriks Komparasi Spasial Pengeluaran Pangan, Nominal Bantuan Sosial, dan Nilai *Assistance Sufficiency Ratio* (ASR) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024/2025

No	Kabupaten / Kota	Anggaran Pangan (EXP_FOOD) (Rp)	Anggaran Non-Pangan (EXP_NONFOOD) (Rp)	Total Biaya Minimum (Rp)	Akumulasi Bansos (Rp)	Assistance Sufficiency Ratio (ASR)	Real Value Gap (RVG) (Rp)
1	Kota Jambi	915.000	635.000	1.550.000	310.000	20,00%	1.240.000
2	Kab. Batanghari	720.000	480.000	1.200.000	315.000	26,25%	885.000
3	Kab. Sarolangun	745.000	495.000	1.240.000	320.000	25,80%	920.000
4	Kab. Kerinci	690.000	460.000	1.150.000	310.000	26,95%	840.000
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	810.000	540.000	1.350.000	315.000	23,33%	1.035.000
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	780.000	520.000	1.300.000	310.000	23,84%	990.000
7	Kab. Muaro Jambi	840.000	560.000	1.400.000	315.000	22,50%	1.085.000
8	Kab. Merangin	750.000	500.000	1.250.000	310.000	24,80%	940.000
9	Kab. Tebo	765.000	510.000	1.275.000	315.000	24,70%	960.000
10	Kab. Bungo	825.000	550.000	1.375.000	310.000	22,54%	1.065.000
11	Kota Sungai Penuh	860.000	590.000	1.450.000	310.000	21,37%	1.140.000
-	Rata-rata Provinsi Jambi	796.363	530.909	1.327.272	312.727	23,83%	1.014.545

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025); Data Anggaran Pangan dan Non-Pangan mengekstrak nilai riil Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) per Kabupaten/Kota dari Publikasi Publikasi "Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota" (BPS RI, 2024).

Untuk mempermudah pemahaman pembaca mengenai bagaimana nilai-nilai pada matriks di atas diperoleh, berikut disajikan simulasi perhitungan aplikatif formula ASR dan RVG dengan mengambil lokus Kabupaten Batanghari:

- Total nilai nominal pengeluaran kebutuhan minimum (Garis Kemiskinan Batanghari) = **Rp1.200.000** (terdiri atas EXP_FOOD sebesar Rp720.000 dan EXP_NONFOOD sebesar Rp480.000).
- Akumulasi nilai nominal transfer bantuan sosial bulanan yang diterima KPM = Rp315.000.
- Perhitungan Rasio Ketercukupan Bantuan (ASR):
$$ASR = (Rp315.000 / Rp1.200.000) \times 100\% = 26,25\%$$

- Perhitungan Kesenjangan Anggaran Riil (RVG):
 $RVG = Rp1.200.000 - Rp315.000 = Rp885.000$

Angka ini membuktikan secara matematis bahwa bansos hanya mampu menyangga sekitar seperempat (26,25%) dari beban pengeluaran dasar, meninggalkan celah defisit sebesar Rp885.000 yang harus dipenuhi sendiri melalui strategi bertahan hidup alternatif (Sumner et al., 2022).

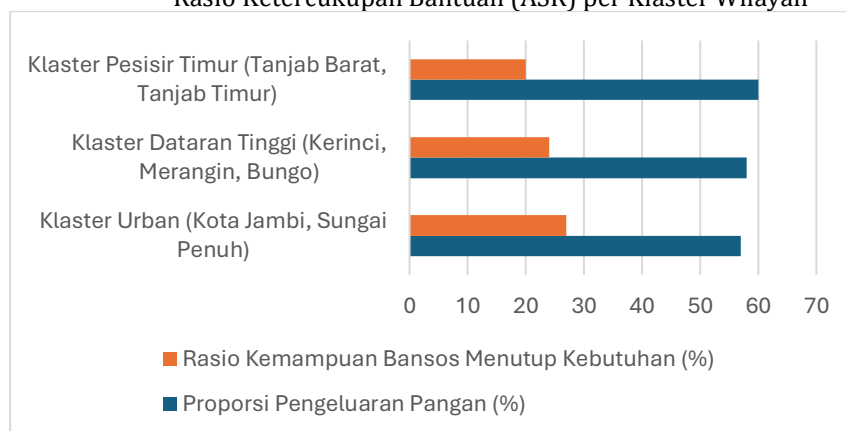
4.3. Pembuktian Hukum Engel dalam Struktur Belanja Domestik

Berdasarkan Tabel 2, KPM memperlihatkan dominasi absolut pada komponen pangan. Rata-rata rumah tangga miskin di 11 kabupaten/kota harus mengalokasikan 57% hingga 60% dari total biaya bulanan mereka semata-mata untuk pangan pokok. Pola konsumsi yang sangat bias pangan ini menjadi bukti empiris berlakunya Hukum Engel secara mutlak (Houthakker, 1957; Chai & Moneta, 2010; Irmanelly et al., 2022). Sebagian besar sumber daya finansial rumah tangga terserap secara absolut untuk pemenuhan pangan subsisten, sehingga mobilitas vertikal ekonomi sangat sulit tercapai tanpa intervensi ekstra negara (Sen, 1999).

4.4. Rasio Defisit: Pemetaan Spasial Assistance Sufficiency Ratio (ASR)

Data menunjukkan bahwa akumulasi jaring pengaman sosial nasional rata-rata hanya sanggup menutup 20,00% hingga maksimal 26,95% dari kebutuhan pokok subsisten riil. Dengan rata-rata provinsi hanya 23,83%, terjadi *Real Value Gap* lebar (rata-rata defisit Rp 1.014.545 per bulan) (Sumner et al., 2022). Guna mendapatkan pemahaman komprehensif, analisis spasial ini memecah wilayah Provinsi Jambi ke dalam klaster:

Grafik 2. Perbandingan Spasial Proporsi Pengeluaran Pangan dan Rasio Ketercukupan Bantuan (ASR) per Klaster Wilayah



Sumber: Hasil Olah Data Susenas dan Kemensos (2025).

1. Klaster Kawasan Urban (Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh). Kota Jambi mencatatkan efektivitas jaring pengaman terendah (20,00%), disusul Sungai Penuh (21,37%). Nominal bantuan seragam dengan cepat tergerus tingginya biaya sewa hunian dan energi perkotaan (Eriyadi et al., 2021).
2. Klaster Kawasan Pesisir Timur (Tanjung Barat dan Tanjung Timur). ASR rendah (23,33% dan 23,84%) di wilayah ini dipicu oleh inefisiensi logistik geografis laut. Akses moda perairan yang mahal menyebabkan harga sembako melampaui HET, menggerus kuantitas barang dari saldo bansos.
3. Klaster Dataran Tinggi dan Pertanian (Kerinci, Batanghari, Sarolangun). Klaster ini mencatatkan ASR yang relatif "lebih baik" (hingga 26,95% di Kerinci). Hal ini rasional karena Kerinci adalah lumbung pangan lokal, sehingga belanja pangan domestik lebih murah (Irmanelly et al., 2022).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan keberadaan "Paradoks Kebutuhan Pokok" secara spasial di Provinsi Jambi. Integrasi Hukum Engel dan Pendekatan Kapabilitas Sen menunjukkan rigiditas anggaran pangan rumah tangga miskin yang menghabiskan 57-60% pendapatan hanya untuk pangan (Houthakker, 1957; Sen, 1999). Instrumen bansos terbukti mengalami depresiasi nilai riil akibat inflasi spasial, dengan rata-rata ASR hanya 23,83%. Akibatnya, tercipta *Real Value Gap* rata-rata sebesar Rp1.014.545/bulan. Kesenjangan ini diperparah kegagalan distribusi berupa *targeting error* yang melanggengkan perampasan kapabilitas (Cornia & Stewart, 1993).

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan kuantitatif tersebut, direkomendasikan poin-poin aksi kebijakan operasional yang dapat dieksekusi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Kalibrasi Bansos Berbasis Indeks Biaya Hidup Spasial: Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mereformulasi besaran nominal bansos perlindungan agar tidak bersifat seragam (*flat-rate*) nasional, melainkan menggunakan skema bobot indeks kemahalan spasial regional (Devereux, 2021).
2. Anggaran Bansos Suplemen Khusus Pesisir dan Perkotaan: Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan skema bansos suplemen (pendamping) tunai khusus wilayah klaster RVG kritis (seperti Kota Jambi) guna menekan tingginya ongkos

non-pangan (Eriyadi et al., 2021).

3. Institusionalisasi Pemutakhiran Data Mandiri di Tingkat Desa: Dinas Sosial wajib mengoperasikan sistem pemutakhiran data terpadu secara *real-time* berbasis komunitas desa untuk memotong mata rantai *inclusion/exclusion error* (Ravallion, 2020).

6. REFERENSI

1. Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487.
2. Amali, M., & Devita, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(2), 1247.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. (2024). *Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Provinsi Jambi Maret 2024*. Jambi: BPS Provinsi Jambi.
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. (2024). *Provinsi Jambi Dalam Angka 2024*. Jambi: BPS Provinsi Jambi.
5. Banito, F. R., Rachmad, M., & Zulfanetti, Z. (2021). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(1), 1-12.
6. Chai, A., & Moneta, A. (2010). Retrospectives: Engel curves. *Journal of Economic Perspectives*, 24(1), 225-240.
7. Cornia, G. A., & Stewart, F. (1993). Two errors of targeting. *Journal of International Development*, 5(5), 459-496.
8. Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
9. Devereux, S. (2021). Social protection and safety nets in the Global South. *Global Social Policy*, 21(3), 1-18.
10. Eriyadi, E., Yulmardi, Y., & Heriberta, H. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga miskin di Kota Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 633-646.
11. Gusmardi, G., Amir, A., & Syafri, M. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Derajat Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 1117.
12. Hadi, S. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
13. Houthakker, H. S. (1957). An international comparison of household expenditure patterns, commemorating the centenary of Engel's law. *Econometrica*, 25(4), 532-551.
14. Irmanelly, I., Amir, A., Zamzami, Z., & Syaparuddin, S. (2022). Economic growth inclusivity in Sumatra Province. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 105-113.
15. Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd revised ed.). New Delhi: New Age International Publishers.
16. Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Edisi ke-3). Jakarta: Penerbit Erlangga.
17. Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
18. Nopriansyah, N., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*,

- 2(3), 121-132.
19. Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–10.
 20. Ravallion, M. (2020). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
 21. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
 22. Sumner, A., Ortiz-Juarez, E., & Hoy, C. (2022). Precarity and the vulnerability to poverty. *World Development*, 150, 105706.
 23. Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175-200.
 24. Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2015). *Economic Development* (12th ed.) Washington, D.C: Pearson.